

Penulis:

Wilibaldus Gaut

Afiliasi:

Institut Filsafat dan
Teknologi Kreatif
Ledalero

Korespondensi:

wilibaldus.gaut.1985@
gmail.com

© WILIBALDUS GAUT

DOI: 10.21460/
gema.2025.112.1631

This work is licenced
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International Licence.

Diterima:
20 Desember 2025

Direvisi:
1 Juli 2026

Disetujui:
18 September 2026

Terbit:
18 Oktober 2026

THE CHURCH AS A POLITICAL BODY IN ITS OWN RIGHT

The Nature and Political Role of the Church in the Political Theology of William T. Cavanaugh

Abstract

By examining some aspects of the political theology of William T. Cavanaugh, this article aims to explore an alternative model of political theology that, while rejecting the privatization of faith, firmly maintains the conviction that the political role of the Church cannot be reduced to that of an instrument serving the secular politics of the state. On the contrary, the political role of the Church should be grounded in and expressive of its identity as the sign and instrument of the Kingdom of God. This line of reasoning offers a distinctive contribution, particularly in light of critiques of the limitations of the so-called dominant model of political theology that contains the Church's political role to functioning as an institution of social criticism, tasked with providing moral guidance and values to the state in exercising its political responsibilities. Within such a framework of the dominant model in political theology, therefore, the Church is political only so long as it participates in the politics of the state. In this article, I argue that Cavanaugh's political theology offers an alternative to the limitations of such a dominant model. For Cavanaugh, the Church is political in its own right, not merely by participating in the politics of the state. This fundamental insight in turn provides a unique and constructive vision of the political vocation and tasks of the Church.

Keywords: church, state, politics, political theology, William T. Cavanaugh.

GEREJA SEBAGAI ENTITAS POLITIK DALAM DIRINYA SENDIRI

Hakikat dan Peran Politis Gereja dalam Teologi Politik William T. Cavanaugh

Abstrak

Dengan membahas beberapa aspek teologi politik William T. Cavanaugh, artikel ini bermaksud mengeksplorasi satu model alternatif teologi politik

yang, sambil menolak privatisasi iman, juga berpegang teguh pada keyakinan bahwa peran politis Gereja tidak boleh direduksi pada ihwal menjadi instrumen bagi politik sekuler yang dijalankan oleh negara. Sebaliknya, peran politis Gereja mesti bersumber pada dan membahasakan jati dirinya sebagai tanda dan sarana Kerajaan Allah. Pemikiran seperti ini unik dan penting, terutama bila ditempatkan dalam konteks kritik terhadap keterbatasan dari apa yang disebut model dominan dalam teologi politik yang membatasi peran politis Gereja pada fungsinya sebagai institusi kritik sosial dengan tugas memberi wawasan moral bagi negara dalam menjalankan tanggung jawab politisnya. Dalam kerangka berpikir model dominan dalam teologi politik ini, dengan demikian, Gereja menjadi politis sejauh ia mengambil bagian dalam politik negara. Dalam artikel ini saya berpendapat bahwa teologi politik Cavanaugh menyediakan alternatif terhadap keterbatasan model dominan tersebut. Bagi Cavanaugh, Gereja itu politis dalam dirinya sendiri, dan hakikat politis ini tidak tergantung pada hubungannya dengan politik negara. Gagasan dasar ini pada gilirannya memberi perspektif yang khas dan konstruktif tentang panggilan dan tugas-tugas politis Gereja.

Kata-kata kunci: gereja, negara, politik, teologi politik, William T. Cavanaugh.

PENDAHULUAN

Salah satu pertanyaan penting yang menuntut refleksi terus-menerus terkait keterlibatan sosial politik Gereja ialah tentang hakikat dan peran Gereja dalam keterlibatan tersebut. Pertanyaan tersebut dapat dirumuskan demikian: Apakah keterlibatan politis Gereja terarah semata-mata untuk mendukung realisasi visi politik sekuler yang dijalankan negara, ataukah Gereja memiliki visi politis yang khas bagi dirinya sendiri? Pertanyaan seperti ini dapat ditempatkan dalam keseluruhan konteks kritik terhadap apa yang oleh teolog Daniel Bell disebut sebagai model dominan dalam teologi politik. Seturut model dominan ini, hakikat politis Gereja didefinisikan semata-mata dalam hubungannya dengan politik negara (2015, 115).

Model dominan teologi politik ini pada galibnya tampil sebagai upaya solutif terhadap

tegangan antara tuntutan liberalisme di satu sisi dan kritik atas privatisasi iman di sisi yang lain. Model dominan mengadopsi visi liberalisme bahwa politik adalah urusan negara, namun pada saat yang sama mengakui bahwa Gereja—dan tentu juga institusi keagamaan lainnya—pun memiliki peran politis yang mesti dijalankan, meski tidak langsung. Peran politis tak langsung demikian terwujud dalam tugas sebagai penjaga nilai, ideal, semangat, dan etos kultural yang berfungsi menginspirasi, menganimasi dan mengarahkan pelbagai pilihan sikap dan tindakan dalam perhelatan politik sekuler (Bell 2015, 116). Peran politik Gereja, dengan demikian, adalah memastikan bahwa politik sekuler berjalan dalam alur yang benar. Dalam kiprahnya yang demikian, jelas pula bahwa Gereja sebetulnya cuma melayani politik sekuler yang dijalankan oleh negara.

Ragam pemahaman dan cara pandang yang dianut oleh pengusung model dominan

dalam teologi politik seperti ini menuai sejumlah kritik. Nada utama dari kritik ini berpusat pada bahaya mereduksi Gereja sebagai semata-mata alat politik negara. Teolog Stephan van Erp, misalnya, menilai bahwa model dominan teologi politik demikian memperlakukan Gereja lebih sebagai “sebuah instrumen politik bagi perubahan sosial” dan bukannya sebagai “tanda dan sarana bagi tatanan politik Allah di dunia menuju Kerajaan-Nya” (2016, 102). Dalam model dominan ini, van Erp menyimpulkan, Gereja sebetulnya tampil tak lebih dari sekadar sebagai “sebuah organisasi politik” (2016, 117). Van Erp tidak sendirian di sini. Sebelumnya, teolog Stanley Hauerwas melontarkan kritik dengan nada yang sama. Dalam model dominan teologi politik, menurut Hauerwas, hakikat politis Gereja direduksi ke dalam perannya sebagai “sebuah asosiasi sukarela” dengan tugas menyampaikan keyakinan-keyakinan religiusnya kepada “tatanan publik yang dikendalikan oleh rasionalitas sekuler,” sebab tugas politis Gereja adalah semata-mata mengungkapkan nilai dan ideal guna mempengaruhi dinamika politik negara (2014, 18-19).

Di titik ini, muncul satu pertanyaan penting: Bagaimana kelemahan-kelemahan utama model dominan teologi politik itu dapat diatasi? Apakah ada, dan kalau ada, seperti apa model teologi politik alternatif yang dapat mengatasi kelemahan model dominan tersebut? Model politik alternatif yang diharapkan tentu saja mesti mampu mempromosikan relevansi sosial politik iman Kristen tanpa perlu jatuh pada jebakan mereduksi hakikat dan peran politis Gereja sebatas sebagai alat politik negara. Dalam artikel ini, dengan membahas teologi

politik William T. Cavanaugh, saya bermaksud mengeksplorasi satu model alternatif teologi politik yang sambil menolak privatisasi iman, juga berpegang teguh pada keyakinan bahwa peran politis Gereja tidak boleh direduksi pada ihwal menjadi instrumen bagi politik sekuler yang dijalankan oleh negara. Sebaliknya, peran politis Gereja mesti bersumber pada dan membahasakan jati dirinya sebagai tanda dan sarana Kerajaan Allah. Dengan demikian, kalau dalam model dominan teologi politik Gereja menjadi politis sejauh ia mengambil bagian dalam politik negara, dari perspektif teologi politik Cavanaugh, Gereja itu politis dalam dirinya sendiri, dan lebih penting lagi, hakikat politis ini tidak tergantung pada hubungannya dengan politik negara.

METODE

Dalam menyelesaikan artikel ini, penulis menggunakan metode sistematis yang berciri analitis, deskriptif, dan kritis. Data penelitian adalah karya-karya utama William T. Cavanaugh di bidang teologi politik. Penulis membaca dan menganalisis secara kritis sejumlah karya utama Cavanaugh tersebut guna menemukan beberapa gagasan teologi politiknya yang dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap kelemahan model dominan dalam teologi politik. Karya-karya utama tersebut mencakup buku-buku seperti *Torture and Eucharist* (1998), *Theopolitical Imagination: Discovering the Liturgy as a Political Act in an Age of Global Consumerism* (2002), *Migrations of the Holy: God, State, and the Political Meaning of the Church* (2011),

Field Hospital: The Church's Engagement with a Wounded World (2016). Selain buku-buku tersebut, karya-karya yang diterbitkan dalam bentuk artikel juga digunakan, semisal artikel berjudul “Eucharistic Sacrifice and the Social Imagination in Early Modern Europe” (2001), “Church” (2004), “The Church in The Streets: Eucharist and Politics” (2014), dan “The Fall of the Fall in Early Modern Political Theology” (2017).

Hasil pembacaan dan analisis atas karya-karya utama Cavanaugh tersebut dipresentasikan dalam sebuah diskusi dan pemaparan kritis sepanjang artikel ini. Untuk membangun diskusi kritis tersebut, penulis juga membaca dan menganalisis sumber-sumber sekunder, baik berupa karya-karya akademik yang ditulis untuk menanggapi pikiran Cavanaugh yang menjadi fokus bahasan artikel ini, maupun karya-karya yang membahas tema yang sama tetapi dari perspektif dan menggunakan cara pendekatan lain. Dialog kritis yang melibatkan penggunaan sumber-sumber sekunder ini terutama membantu dalam usaha memahami lebih dalam pemikiran Cavanaugh, selain juga berguna dalam hubungan dengan penyajian tanggapan kritis terhadap pemikiran Cavanaugh terkait hakikat dan tugas politis Gereja.

Dalam artikel ini, penyajian hasil pembacaan, analisis, dan diskusi kritis atas karya utama Cavanaugh tersebut guna menemukan beberapa gagasan teologi politiknya yang dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap kelemahan model dominan dalam teologi politik dimulai dengan pemaparan sangat singkat atas riwayat akademik Cavanaugh. Setelah itu, penulis membahas pandangan Cavanaugh tentang

Gereja sebagai entitas politis dalam dirinya sendiri. Uraian ini lalu disusul oleh kajian tentang pandangan Cavanaugh berkaitan dengan tugas-tugas politis Gereja. Setelah membahas pandangan Cavanaugh tentang hakikat dan tugas politis Gereja, penulis menyajikan tanggapan kritis atas pemikirannya. Seluruh artikel ini diakhiri dengan sebuah catatan penutup yang berisi sintesis atas diskusi sepanjang artikel ini serta sejumlah pertanyaan yang lahir dari keterbatasan cakupan dan diskusi dalam artikel ini, yang dapat memberi petunjuk bagi riset-riset lanjutan dalam tema yang dibahas dalam artikel ini.

RIWAYAT AKADEMIK WILLIAM T. CAVANAUGH

Cavanaugh adalah teolog Amerika yang dikenal karena gagasan-gagasannya dalam bidang teologi politik dan juga etika Kristiani. Cavanaugh menjadi salah satu editor untuk 2 buku pegangan terpenting dalam bidang teologi politik, yakni *The Blackwell Companion to Political Theology* (2004) dan *An Eerdmans Reader in Contemporary Political Theology* (2012). Dia menamatkan pendidikan sarjana dari Notre Dame University di Amerika Serikat pada tahun 1984 dan pendidikan jenjang master dari Cambridge University di Inggris pada tahun 1987. Pada tahun 1996 Cavanaugh memperoleh gelar doktor di bidang teologi dari Duke University dengan disertasi berjudul *Torture and Eucharist: Theology, Politics, and the Body of Christ*, yang digarapnya di bawah bimbingan Stanley Hauerwas sebagai supervisor doktoral.

Di antara jeda waktu setelah selesai studi master dan permulaan studi doktoral, Cavanaugh bekerja di Chile, bergabung dalam beberapa lembaga riset dan terlibat dalam gerakan sosial yang berbasis dan terafiliasi dengan Gereja. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Cavanaugh bekerja di University of St. Thomas di Minnesota, Amerika Serikat selama 15 tahun. Pada tahun 2010, Cavanaugh menjadi profesor teologi pada DePaul University, Amerika Serikat. Di institusi ini, dia juga menjadi direktur untuk *Center for World Catholicism and Intercultural Theology*.

CAVANAUGH TENTANG GEREJA SEBAGAI ENTITAS POLITIS DALAM DIRINYA SENDIRI

Seluruh argumentasi teologi politik Cavanaugh adalah elaborasi atas tesis utamanya bahwa Gereja adalah entitas politis dalam dirinya sendiri. Untuk mengurai tesis utama ini, pada bagian pertama artikel ini saya pertama-tama akan mendiskusikan latar belakang pemikiran teologi politik Cavanaugh, yakni tanggapan terhadap marginalisasi Gereja dalam dinamika politik modern. Uraian ini akan disusul dengan pembahasan proposal teologis Cavanaugh akan pentingnya penegasan jati diri Gereja sebagai *ekklesia*, komunitas yang peduli pada kepentingan umum melampaui kepentingan internal komunitas gerejawi itu sendiri. Kedua topik bahasan ini mengantarkan ke sebuah sintesis mengenai pandangan Cavanaugh tentang Gereja sebagai sebuah entitas yang politis dalam dirinya sendiri.

1. Tanggapan terhadap Marginalisasi Gereja sebagai Titik Tolak

Seluruh proyek teologi politik Cavanaugh pada prinsipnya dapat dilihat sebagai upaya menawarkan sebuah politik yang didasarkan pada imajinasi Kristiani. Tetapi apa yang dia maksudkan dengan politik? Dalam pengantar untuk bukunya *Theopolitical Imagination*, Cavanaugh mendefinisikan politik sebagai “sebuah praktik imajinasi” tentang bagaimana mengorganisasikan entitas-entitas atau institusi-institusi sosial dalam ruang dan waktu (2002, 1-2). Cara dan model pengorganisasian kehidupan sosial dalam masyarakat, menurutnya, didasarkan pada cara orang atau kelompok masyarakat tersebut mengimajinasikan kehidupan sosial macam mana yang dikehendaki dan apa saja yang dibutuhkan dari setiap individu dan komunitas secara umum agar imajinasi itu terwujud. Imajinasi, demikian Cavanaugh, berfungsi sebagai “cara-cara menarasikan dunia yang integral dalam cara-cara bertindak di dalam dunia,” dan karenanya, imajinasi sosial berhubungan erat dengan konstruksi entitas atau institusi sosial (2009, 1).

Untuk memahami dengan lebih baik gagasan Cavanaugh demikian, hemat saya, pandangan filosof Charles Taylor tentang peran imajinasi sosial bagi praktik sosial dapat membantu (2007, 920). Dalam bukunya *Modern Social Imagination*, Taylor memahami imajinasi sosial sebagai cara orang mengimpikan keberadaan sosial mereka, yakni ihwal “bagaimana mereka harus hidup bersama, harapan-harapan yang harus mereka wujudkan, dan juga gagasan-gagasan normatif dan imaji-imaji dasar yang mendasari harapan-

harapan itu” (2004, 23). Imajinasi, demikian Taylor, memegang peranan penting dalam membentuk dan mengorganisasikan kehidupan sosial dalam masyarakat, sebab imajinasi sosial membentuk pemahaman bersama yang memungkinkan orang untuk meneruskan praktik-praktik bersama yang menjadi sendi pembentukan hidup sosial (2004, 24).

Ikhtiar Cavanaugh untuk menawarkan suatu politik yang berakar pada imajinasi Kristiani sebetulnya muncul sebagai respons terhadap persoalan terabsorpsinya Gereja ke dalam negara. Dalam bukunya *Migrations of the Holy*, Cavanaugh mengamati bahwa “negara telah menjajah imajinasi politik orang-orang Kristiani” (2011, 3). Ciri khas negara, menurut Cavanaugh, terletak pada monopoli yang sah atas penggunaan kekuasaan koersif dalam suatu wilayah tertentu. Bagi Cavanaugh, negara merujuk pada “suatu bentuk politik yang didasarkan pada konsep modern tentang kedaulatan, yang dapat didefinisikan sebagai ‘otoritas tertinggi dalam suatu wilayah’” (2011, 10, 45).

Cavanaugh memegang teguh definisi demikian tentang negara dan mengembangkannya secara konsisten dalam usahanya mendiskusikan politik negara vis-à-vis politik Gereja. Menurutnya, penjajahan negara atas politik Gereja mengimplikasikan bahwa negara mempertahankan monopoli atas politik. Dalam skenario demikian, politik menjadi identik dengan negara. Berbicara tentang politik berarti berbicara tentang negara, sebab negara adalah satu-satunya otoritas yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat. Cavanaugh menolak gagasan demikian. Ia berpendapat bahwa sebagai bentuk pengaturan

hidup sosial dalam masyarakat, politik tidak dapat dipahami dan diperlakukan hanya sebagai urusan negara. Politik, dia berpendapat, “tidak didefinisikan sebagai perebutan kekuasaan negara, melainkan secara lebih luas sebagai pengaturan entitas-entitas sosial dalam ruang dan waktu” (2014, 401). Untuk memperkuat posisinya, Cavanaugh kembali pada definisinya tentang politik sebagai praktik imajinasi. Ia mengakui bahwa imajinasi sangat berkaitan erat dengan seni. Karenanya, setelah menyatakan bahwa politik adalah praktik imajinasi, ia segera menambahkan bahwa politik juga kerap dipahami sebagai “seni tentang kemungkinan” (2002, 1).

Seturut konsep politik sebagai seni tentang kemungkinan, politik berurusan dengan segala kemungkinan dalam mengorganisasikan kehidupan dalam masyarakat, bergantung pada imajinasi sosial yang digunakan. Cavanaugh berpendapat bahwa cara mengorganisasikan kehidupan masyarakat—yang menjadi inti dari konsep politik—didasarkan pada narasi-narasi tertentu mengenai hakikat manusia dan tujuan akhir keberadaannya (2002, 2). Proyek teologi politik Cavanaugh adalah upaya untuk menunjukkan bahwa bahkan kisah Kristiani pun dapat menjadi dasar bagi suatu cara mengatur hidup sosial kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan kisah Kristiani di sini adalah narasi tentang “kesatuan kodrati” umat manusia, yang bertolak belakang dengan antropologi negara yang menekankan individualitas setiap manusia (2002, 10-20).

Bagi Cavanaugh, politik negara hanyalah salah satu kemungkinan, dan karenanya tidak merepresentasikan keseluruhan kisah dalam ranah politik. Sebab itu, dalam teologi

politiknya, Cavanaugh mengkritik posisi absolut politik negara sembari memberi ruang bagi “prinsip pengaturan kehidupan sosial yang diinspirasi oleh agama” (Rowe 2009, 585). Cavanaugh melihat absolutisasi politik negara sebagai produk dari Pencerahan. Kemunculan negara modern dan perannya yang semakin dominan adalah hasil dari pemisahan antara otoritas sipil dan otoritas agama, dalam hal ini otoritas gerejawi. Negara sekuler modern menegaskan kemerdekaannya dari otoritas Gereja, sebab visi negara modern adalah menyelamatkan masyarakat dari pengaruh kekuasaan gerejawi dan membangun kehidupan sosial yang independen dari visi keagamaan. Namun, bagi Gereja, pemisahan ini membawa dampak negatif terhadap peran publiknya, sebab realisasi visi Pencerahan tersebut berakibat pada marginalisasi Gereja dari kehidupan publik (2002, 20).

Pemisahan tersebut diikuti oleh pembagian peran. Tugas untuk mengatur kehidupan sosial diserahkan kepada negara, sementara Gereja dipandang hanya bertanggung jawab atas urusan-urusan spiritual. Dalam konteks ini, demikian Cavanaugh, Gereja “menjadi semata-mata *congregatio fidelium*, sekumpulan orang beriman yang bertujuan untuk memelihara iman,” sebab “seiring berjalannya waktu, yang tersisa bagi Gereja hanyalah pemerintahan batin atas jiwa para anggotanya; sedangkan tubuh mereka diserahkan kepada otoritas sekuler” (2002, 24-25). Sebagaimana dapat disimak dalam uraian selanjutnya, penerapan visi negara sekuler modern ini bertentangan dengan realisasi visi Gereja, sebuah entitas dan institusi yang pada galibnya selalu berkarakter publik dan politis.

2. Meninjau Kembali Gereja sebagai *Ekklesia*: Karakter Publik Gereja

Cavanaugh menolak kecenderungan marginalisasi Gereja sebagai akibat dari kemunculan negara modern. Gereja bukanlah suatu entitas (badan) yang berfungsi hanya untuk kepentingan tertentu anggota dan kelompoknya sendiri. Untuk mendukung gagasan tentang identitas publik dan politik Gereja, Cavanaugh kembali kepada cara Gereja bahari mengidentifikasi dirinya sebagai *ekklesia*. Cavanaugh menulis:

“Dengan menyebut dirinya *ekklesia*, Gereja mengidentifikasi dirinya sebagai Israel, perhimpunan yang membawa kehadiran publik Allah dalam sejarah. Dalam bahasa Yunani, *ekklesia* merujuk pada perhimpunan orang-orang yang memiliki hak kewarganegaraan dalam suatu polis tertentu. Dengan menyebut dirinya *ekklesia*, Gereja mengidentifikasi dirinya sebagai sepenuhnya publik, menolak mendefinisikan dirinya menggunakan bahasa yang tersedia untuk asosiasi-asosiasi pribadi (*koinon* atau *collegium*). Gereja tidak berkumpul seperti *koinon* di sekitar kepentingan tertentu, melainkan peduli dengan kepentingan seluruh kota, karena ia adalah saksi dari aktivitas Allah dalam sejarah” (2011, 42-49; Cf. 2002, 86)

Nukilan ini menggarisbawahi sejumlah pokok pemikiran penting mengenai identitas politik yang melekat pada Gereja. Pertama, Gereja itu sendiri bersifat politis karena ia ikut memikirkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Karenanya, sebagaimana dikatakan oleh teolog Gerhard Lohfink (1934-2024) dalam bukunya *Does God Need the Church?*, Gereja bahari sengaja lebih memilih mengadopsi istilah sipil *ekklesia* daripada *koinon*, *thiasos*,

atau *collegium* untuk mengidentifikasi dirinya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Gereja menganggap kesejahteraan masyarakat yang lebih luas sebagai bagian yang melekat dari misinya di dunia. Gereja tidak memperkenalkan dan menampilkan dirinya sebagai *koinon* atau *collegium*, yaitu sebagai kelompok kepentingan eksklusif yang cuma membela kepentingan mereka sendiri. Penggunaan istilah *ekklesia* meletakkan dasar untuk mengidentifikasi Gereja sebagai suatu institusi publik dengan relevansi dan tugas politis yang jelas (Lohfink 1999, 218-219).

Kedua, kenyataan bahwa Gereja peduli dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas menegaskan bahwa Gereja memberi perhatian serius pada realitas kehidupan sehari-hari. Gereja dipanggil untuk menjadi “Gereja yang bekerja di dunia,” yang berarti bahwa Gereja seharusnya terlibat aktif dalam urusan duniawi. Lohfink selanjutnya berpendapat bahwa selain menunjukkan bahwa Gereja memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, istilah *ekklesia* juga digunakan untuk menegaskan bahwa Gereja memiliki “kepentingan dalam segala hal,” yang berarti bahwa ia peduli dengan dan memiliki perhatian terhadap semua aspek kehidupan (Lohfink 1999, 219). Cavanaugh mengadopsi gagasan ini dan memakainya sebagai dasar bagi kritiknya terhadap relegasi Gereja sebagai *congregatio fidelium* yang hanya bertanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa anggotanya. Menjadi religius tidak membuat seseorang teralienasi dari keterlibatannya dalam urusan duniawi. Dalam alur pemikiran ini, Cavanaugh bersikap kritis terhadap upaya pemisahan antara yang religius dan yang sekuler. Baginya, pemisahan

ini tidak bersifat alami, melainkan dibangun pada era modern untuk tujuan politis tertentu, yakni demi mempertegas kedaulatan otoritas sipil (2016, 47, 182, 218).

Ketiga, signifikansi publik Gereja bukan semata-mata ihwal menjadi relevan secara sosial, sebab signifikansi tersebut lebih tepat dilihat sebagai sebuah imperatif teologis yang fundamental. Kehadiran dan keterlibatan publik Gereja harus dipahami dalam rangka menunjukkan aktivitas Allah yang terus berlangsung dalam sejarah. Jika Gereja hadir untuk menjadi saksi atas misi Allah, maka ia hadir demi seluruh dunia karena rencana keselamatan Allah bersifat universal. Seperti direfleksikan Lohfink, peran sentral Gereja dalam sejarah keselamatan berkaitan dengan kenyataan bahwa meskipun Allah menghendaki keselamatan dunia secara keseluruhan, Dia selalu bekerja dengan cara konkret melalui orang-orang tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula (Lohfink 1999, 25-27). Jadi, Gereja mungkin tampak sebagai kelompok partikular tertentu, namun kehadirannya tidak pernah dipandang terpisah dari keselamatan universal yang Allah kehendaki untuk seluruh dunia.

Keempat, sebagaimana dicatat oleh Cavanaugh, gagasan bahwa Gereja bersifat politis tidak boleh membuat seseorang berpikir bahwa Gereja adalah “polis” yang lain (2011, 43). Sebab, “Kerajaan Allah,” yang perwujudannya menjadi inti dari politik Gereja, “tidak perlu menyerupai kerajaan-kerajaan dunia ini untuk menjadi sosial dan politis” (2016, 47). Lebih lanjut, memandang Gereja sebagai “polis” yang lain berisiko mengabaikan dimensi eskatologisnya. Pada

titik ini, hemat saya, pandangan Cavanaugh dapat disejajarkan dengan visi Konsili Vatikan II yang menyatakan bahwa meskipun Gereja memiliki peran politik tertentu karena peduli dengan kebaikan bersama masyarakat, ia tetap tidak bisa diidentifikasi secara otomatis dengan tatanan politik duniawi (*Gaudium et Spes*, 76). Sementara tatanan politik duniawi menjangkarkan basis legitimasinya dalam mekanisme politik sekuler, Gereja adalah komunitas yang didirikan oleh Allah sendiri melalui Kristus. Gagasan ini, bersama kedua pokok pikiran lain yang dibahas sebelumnya, bersama-sama meletakkan fondasi bagi visi teologis utama Cavanaugh bahwa Gereja berciri politis dalam dirinya, yang akan menjadi pokok bahasan bagian selanjutnya.

3. Gereja Bersifat Politis dalam Dirinya Sendiri

Dari uraian sebelumnya menjadi jelas bahwa bagi Cavanaugh, mengabaikan signifikansi politik Gereja berarti menyangkal eksistensinya sendiri (2004, 397). Namun, apa artinya bagi Gereja ‘memiliki signifikansi politik’, dan bagaimana pula signifikansi politik ini harus diterapkan? Bagi Cavanaugh, Gereja selalu bersifat politis dalam dirinya sendiri. Gagasan dasarnya ini memiliki konsekuensi yang mendalam. Seperti dijelaskan sebelumnya, Cavanaugh menantang pemisahan ketat antara yang religius dan yang sekuler lantaran pemisahan demikian bakal mengarah pada spiritualisasi Gereja (2002, 14). Meski demikian, upaya Cavanaugh untuk menegaskan signifikansi politik Gereja tidak didasarkan pada motivasi untuk memperoleh kekuasaan duniawi atau keinginan untuk

menjadi bagian inheren dari politik negara. Baginya, setiap upaya untuk merumuskan ulang signifikansi politik Gereja sama sekali tidak dimaksudkan untuk menciptakan kembali model Konstantinian mengenai keterlibatan politik Gereja (2002, 70).

Jadi, bagi Cavanaugh, di satu sisi Gereja bersifat politis, sementara di sisi lain, sifat politisnya tidak bergantung pada atau didefinisikan oleh hubungannya dengan politik negara. Meskipun Gereja harus terlibat dalam “urusan duniawi,” ia tidak seharusnya menjadi bagian dari institusi politik sekuler (2011, 41, 65, 76). Gagasan Cavanaugh bahwa Gereja memiliki politiknya sendiri mengasumsikan bahwa Gereja memiliki politik yang berbeda dari politik sekuler negara (2002, 83; 2011, 4-5). Politik Gereja ditandai dengan kesetiaan utamanya kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan cara Allah dalam mengatur kehidupan bersama, yang telah ditunjukkan melalui Israel dan kemudian diteruskan dalam Kristus dan Gereja-Nya. Politik Gereja, menggunakan kata-kata Lohfink, adalah untuk menunjukkan tatanan sosial yang dimaksud Allah untuk dihidupkan dalam dunia ini (1999, 106). Signifikansi politis Gereja berakar pada identitasnya sebagai saksi terhadap suatu tatanan masyarakat yang dikehendaki Allah, yang tidak dapat secara sederhana dan serampangan diidentifikasi dengan tatanan politik duniawi mana pun. Alur berpikir semacam ini menyediakan konteks dalam mana gagasan Cavanaugh bahwa Gereja memang peduli dan memperhatikan kepentingan publik meski ia tetap tidak dapat dianggap sekadar sebagai satu polis yang lain, dapat dipahami dengan lebih baik (2014, 388).

Lebih lanjut, mengatakan bahwa Gereja adalah entitas politis dalam dirinya sendiri mengindikasikan bahwa Gereja memiliki visi independen dalam mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Visi independen ini berkaitan dengan misinya di dunia ini, yakni untuk menjadi saksi dari Kerajaan Allah. Cavanaugh berusaha tidak hanya untuk menunjukkan bahwa Gereja bersifat politis, tetapi juga untuk menyampaikan argumen bahwa sifat politis Gereja harus didefinisikan secara teologis, yaitu dalam kaitannya dengan peran penting Gereja dalam kerangka perealisasi misi keselamatan Allah (2011, 124; 2004, 293). Seperti yang disimpulkan oleh teolog Michael Kirwan, ikhtiar Cavanaugh tampaknya didasarkan pada “konsep teologi politik sebagai eklesiologi” (2009, 15). Pemahaman yang demikian tentang sifat politis Gereja pada gilirannya menjelaskan mengapa Cavanaugh memiliki visi yang unik tentang tugas politik Gereja—seperti yang akan dibahas dalam uraian selanjutnya—yang berbeda dari apa yang umumnya dianut dalam teologi politik.

PANDANGAN CAVANAUGH TENTANG TUGAS-TUGAS POLITIS GEREJA

Sebagai kelanjutan dari proposisi teologis utamanya bahwa Gereja itu politis dalam dirinya sendiri, Cavanaugh lalu memetakan gagasannya tentang tugas-tugas politis Gereja. Uraian tentang pemikiran Cavanaugh tentang tugas politik Gereja pada bagian ini akan dijabarkan dalam tiga gagasan pokok

yang pada galibnya bertalian satu sama lain dan membentuk satu-kesatuan visi teologis. Pada tempat pertama akan dibahas pemikiran Cavanaugh tentang Gereja yang mesti menjalankan peran kritis mendemistifikasi negara-bangsa sebagai tugas politisnya yang pertama dan utama. Selanjutnya akan diuraikan pandangan Cavanaugh bahwa Gereja dipanggil untuk merealisasikan sebuah politik alternatif terhadap politik yang dijalankan negara. Keseluruhan bahasan mengenai pandangan Cavanaugh tentang tugas-tugas politis Gereja ini akan ditutup dengan pembahasan tentang desakan bahwa dalam menjalankan tugas politisnya, Gereja mesti bertindak sebagai Tubuh Kristus.,

1. Mendemistifikasi Negara-Bangsa

Bertolak dari gagasan bahwa Gereja adalah entitas politis dalam dirinya sendiri, Gereja lantas memiliki politiknya sendiri, dalam arti bahwa ia memiliki cara sendiri dalam mengatur entitas-entitas dalam masyarakat. Bagi Cavanaugh, tugas politis pertama dan utama dari Gereja ialah menantang posisi absolut dan monopoli negara dalam hal politik. Cavanaugh, misalnya, secara elokuen menulis:

“Tugas mendesak Gereja, dengan demikian, adalah untuk membongkar mitos negara-bangsa [...] Pada titik terbaiknya, negara-bangsa mungkin menyediakan barang dan jasa yang berkontribusi pada tatanan terbatas tertentu [...] Namun, negara bukanlah penjaga kebaikan bersama, dan kita perlu menyesuaikan harapan kita sesuai dengan itu. Gereja harus membebaskan imajinasinya dari penawanan oleh negara-bangsa: ia harus membentuk dirinya sebagai ruang sosial alternatif, dan tidak hanya

bergantung pada negara-bangsa untuk mewujudkan aspek sosial kehadirannya dalam masyarakat, dan Gereja harus, pada setiap kesempatan, ‘memperumit’ ruang, yaitu mempromosikan penciptaan ruang-ruang di mana ekonomi dan otoritas alternatif berkembang” (2011, 42).

Poin utama yang ingin disampaikan Cavanaugh di sini, seperti yang juga dikatakannya di tempat lain, adalah bahwa seringkali negara berfungsi sebagai alat untuk kepentingan segelintir elit daripada untuk kepentingan publik (2011, 18). Sentralisasi kekuasaan politis sebagai salah satu elemen khas konstitusi negara modern memberi jalan bagi eksese negatif ini (2011, 14). Gagasan Cavanaugh dalam konteks ini, hemat saya, dapat dipahami dalam terang visi Konsili Vatikan II tentang komunitas politik, dalam hal ini negara. Dalam *Gaudium et Spes*, misalnya, peran lembaga politik sekuler dalam upaya mencapai kebaikan bersama diakui secara positif. Akan tetapi, pengakuan ini langsung diikuti dengan catatan bahwa dalam keadaan tertentu, yaitu ketika negara mengadopsi sistem totaliter, ia dapat melakukan sebaliknya, melanggar kebaikan bersama (*Gaudium et Spes*, 75).

Bagian dari tugas mendemistifikasi negara-bangsa sebagai satu-satunya aktor yang menyediakan kebaikan bersama adalah menolak absorpsi imajinasi sosial Gereja ke dalam imajinasi sosial negara. Menurut Cavanaugh, absorpsi seperti ini bermasalah lantaran keduanya, yakni Gereja dan negara, berdiri di atas fondasi pandangan yang berbeda mengenai individu dan masyarakat. Antropologi Kristen melihat bahwa semua manusia pada hakikatnya adalah satu, sebab “bukan individu

melainkan manusia secara keseluruhanlah yang diciptakan dan diselamatkan” (2002, 11; 2016, 133). Antropologi yang mendasari praktik bernegara, sebaliknya, memberi penekanan pada primasi individualitas. Dengan kata lain, kalau antropologi Kristiani mengasumsikan kesatuan alamiah antara semua umat manusia, antropologi negara mengusung gagasan tentang “individualitas yang esensial umat manusia” (2002, 17).

Dalam artikelnya yang berjudul “Eucharistic Sacrifice and the Social Imagination in Early Modern Europe,” Cavanaugh lebih lanjut membahas isu ini. Ia menunjukkan bahwa imajinasi sosial Kristen menekankan kesatuan organik masyarakat, sementara antropologi negara modern memandang kehidupan sosial di masyarakat sebagai hasil dari kontrak sosial, yang dengan demikian bersifat artifisial (2001, 591-593; Cf. 2017, 476-479). Singkatnya, antropologi Kristen menekankan aspek komunitas dalam keberadaan manusia, sementara antropologi yang menyokong filosofi negara modern menonjolkan aspek individual dari keberadaan manusia.

Seiring dengan demistifikasi negara-bangsa, bagi Cavanaugh, tugas Gereja adalah memperluas ruang di mana ekonomi dan politik alternatif dapat berkembang. Dalam bukunya *Field Hospital: The Church's Engagement with a Wounded World*, Cavanaugh mengatakan bahwa tugas Gereja adalah menciptakan “otoritas politik yang terdispersi,” di mana asosiasi-asosiasi perantara memainkan peran yang menentukan (2016, 121-139). Dengan mendukung otoritas politik yang terdispersi, Cavanaugh mengkritik segala bentuk sistem

kesatuan yang berpusat pada negara. Tentu saja, ini hanyalah cara lain untuk menegaskan bahwa negara tidak memiliki monopoli tunggal dalam mengatur kehidupan masyarakat. Cavanaugh sebaliknya mengusulkan sistem politik yang lebih terdesentralisasi. Sistem politik ini, dalam pemikirannya, “akan memberi keistimewaan pada bentuk-bentuk komunitas lokal” dan “menghubungkannya dalam jaringan konektivitas trans-lokal” (2011, 4).

Selain menciptakan ruang bagi berkembangnya komunitas lokal dan organisasi perantara, dalam bukunya *Torture and Eucharist: Theology, Politics, and the Body of Christ*, Cavanaugh menjelaskan bahwa sistem politik yang tersentralisasi pada negara dengan mudah akan menimbulkan kekerasan. Berdasarkan studi kasusnya mengenai rezim totaliter Jenderal Pinochet yang berkuasa di Chile sejak 1974-1990, ia mengklaim bahwa penyiksaan adalah strategi yang sering digunakan oleh negara untuk menghilangkan asosiasi-asosiasi perantara dan melanggengkan monopoli atas pengaturan kehidupan sosial (1998, 267). Penolakan Cavanaugh terhadap sistem politik kesatuan yang tersentralisasi pada negara merupakan bagian dari kritiknya terhadap penggunaan kekerasan yang tampaknya menjadi bagian inheren dari sistem totaliter.

2. Mewujudnyatakan sebuah Bentuk Politik Alternatif

Visi teologis bahwa Gereja bersifat politis dalam dirinya sendiri menegaskan bahwa signifikansi politik Gereja tidak ditentukan oleh hubungannya dengan politik negara. Karena

itu, Cavanaugh menyatakan bahwa tugas politik Gereja bukanlah untuk mempengaruhi politik negara, melainkan untuk menghadirkan suatu bentuk politik yang berbeda. Ia menulis:

“Peran Gereja bukan semata-mata memberikan rekomendasi kebijakan kepada negara, melainkan mewujudkan suatu bentuk politik yang berbeda, agar dunia dapat melihat politik yang sejati dan mengalami transformasi. Dengan demikian, Gereja tidak menarik diri dari dunia, tetapi melayaninya, baik sebagai tanda keselamatan Allah bagi dunia maupun sebagai pengingat bagi dunia akan apa yang belum dimilikinya” (2011, 138).

Teologi politik secara umum telah dikembangkan sebagai respons terhadap dua kecenderungan ekstrem, yakni privatisasi iman di satu sisi dan fenomena Konstantinianisme—di mana Gereja terjatuh sebagai bagian inheren dari politik negara—di sisi lain. Namun, tentang apa sesungguhnya peran politik Gereja masih terdapat aneka ragam pandangan. Menurut Cavanaugh, peran politik Gereja adalah mewujudkan bentuk politik yang berbeda dari politik negara. Pada titik ini, posisi Cavanaugh tampil sebagai sebetulnya kritik terhadap kecenderungan dominan dalam teologi politik Barat yang berkembang sejak Perang Dunia I, yang mendefinisikan politik sebagai urusan negara, dan karena itu menjadi politis bagi Gereja berarti mempengaruhi politik negara (2012, 739). Salah satu representasi utama dari model teologi politik ini adalah Johann Baptist Metz, yang mendefinisikan peran politis Gereja sebagai institusi kritik sosial bagi politik negara (Metz 1969, 118).

Keberatan utama Cavanaugh terhadap cara merumuskan peran politik Gereja yang

dianut oleh model dominan dalam teologi politik bertumpu pada dua alasan. Pertama, model teologi politik tersebut mengandaikan bahwa negara memegang monopoli atas politik. Politik dipahami sebagai wilayah tanggung jawab negara, sementara peran Gereja sebagai institusi kritik sosial dibatasi hanya pada penyediaan nilai-nilai yang dapat dijadikan rujukan etis oleh negara (Kirwan 2014, 510). Kedua, dalam alur pemikiran yang dianut oleh model dominan tersebut, Gereja diposisikan sebagai pelayan bagi politik negara. Menurut Cavanaugh, meskipun Gereja hadir dan aktif di tengah dunia, ia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen dari politik duniawi. Sebab jika demikian, Gereja diturunkan fungsinya menjadi semacam sub-sistem dari politik sekuler. Bagi Cavanaugh, Gereja tidak hadir untuk melayani politik negara, melainkan “untuk membawa politik Allah ke dalam sejarah” (2011, 138).

Dalam teologi politik yang mendefinisikan signifikansi politik Gereja dalam kaitannya dengan peran yang dimainkan terhadap politik negara, peran politik Gereja bersifat tidak langsung dan bergantung pada negara. Dalam analisis teologisnya, Cavanaugh menemukan bahwa bentuk peran politik yang tidak langsung ini juga tampak dalam apa yang disebut sebagai teologi publik (2002, 3). Mengutip Sebastian Kim, “teologi publik mewakili perspektif komunitas religius dan tradisi iman tertentu serta membahas makna publik dari konsep-konsep teologis,” sebuah pandangan yang berakar pada keyakinan dasar bahwa orang-orang beriman “dapat memberikan kontribusi dari sumber-sumber

iman mereka terhadap kebijakan publik dan kesejahteraan bersama” (2011, 4-9).

Menurut Cavanaugh, dalam melakukan teologi publik demikian, Gereja diposisikan sebagai bagian dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil dimengerti sebagai “sebuah ruang partisipasi bebas yang dianggap berdiri secara independen dari negara” (2002, 6). Hal yang penting dicatat dalam konteks ini ialah bahwa untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik yang diorganisasikan oleh masyarakat sipil ini, Gereja tidak dapat begitu saja menggunakan bahasa atau simbol religiusnya. “Jika suatu teologi ingin dipercaya untuk berpartisipasi dalam wacana publik,” tulis Max Stackhouse, “ia harus mampu menyampaikan argumennya secara masuk akal dalam istilah yang dapat dipahami oleh mereka yang bukan penganut iman tersebut” (2007, 112).

Cavanaugh menilai model masyarakat sipil bermasalah karena dua alasan utama. Alasan pertama adalah bahwa dalam banyak kasus, masyarakat sipil tidak lagi merupakan ruang bebas sebagaimana seharusnya, sebab negara telah menembus ruang masyarakat sipil yang secara ideal bebas dari campur tangan negara (2002, 74). Alasan kedua dari keberatan Cavanaugh terhadap model masyarakat sipil sehubungan dengan kiprah publik Gereja berkaitan dengan risiko yang dihadapi Gereja ketika berpartisipasi dalam perdebatan publik. Menurut Cavanaugh, “harga yang harus dibayar Gereja untuk diterima dalam ‘publik’ adalah penyerahan klaim-kebenaran partikularnya kepada standar nalar publik” (2002, 80). Dalam proses ini, demikian Cavanaugh, aspirasi Gereja harus bersaing dengan berbagai suara lainnya, dan

selalu ada kemungkinan suara Gereja kalah. Justru karena ketidakpastian inilah Cavanaugh cenderung menganggap partisipasi dalam debat publik sebagai sesuatu yang sia-sia (2002, 54).

Dalam dua tipe “teologi politik tidak langsung” yang telah disebutkan sebelumnya, Gereja bertindak layaknya organisasi sosial lainnya yang melayani politik negara dengan turut serta mempengaruhi perumusan kebijakan publik. Menolak pandangan ini, Cavanaugh berpendapat bahwa sebagai tanda dan sarana Kerajaan Allah, tugas politis Gereja adalah untuk menghadirkan politik Allah, bukan menjadi sarana bagi politik negara. Sebagai agen keselamatan, Gereja memiliki politiknya sendiri, sebab keselamatan secara intrinsik bersifat sosial, dan karena itu “sejarah keselamatan tidak dapat dipisahkan dari sejarah politik” (Cavanaugh 2011, 124). Alih-alih menjadi alat bagi politik negara, Gereja justru dipanggil untuk menjadi “komunitas umat yang menjadi tanda keselamatan, satu komunitas konkret yang hidup secara berbeda agar orang lain pun dapat mengecap dan melihat revolusi damai Allah serta turut diberkati” (Cavanaugh 2011, 124).

Dalam bukunya *Field Hospital: The Church's Engagement with a Wounded World*, Cavanaugh mengemukakan satu lagi alasan penting lain bagi penolakannya terhadap model “teologi politik tidak langsung”. Tentang keterlibatan Gereja di tengah dunia, Cavanaugh menekankan pendekatan dari bawah. Sebagaimana gambaran tentang “rumah sakit di medan tempur” (*field hospital*) mengisyaratkan, Gereja seharusnya terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari umat

manusia, bukan sekadar “beroperasi dalam kerangka politik dan ekonomi dunia yang telah ada” atau menjadi “pemain dalam permainan para pemegang kuasa” (2016, 3). Posisi seperti ini tentu ada benarnya. Namun, hemat saya, posisi ini juga tampaknya mengabaikan kebenaran bahwa bekerja demi kepentingan banyak orang dan perbaikan masyarakat juga menuntut upaya aktif untuk mempengaruhi kekuasaan dan institusi politik yang telah mapan agar sungguh menjamin keadilan bagi semua.

3. Bertindak sebagai Tubuh Kristus

Menurut Cavanaugh, dalam menjalankan tugas politisnya, Gereja harus bertindak sebagai tubuh Kristus, sebuah gagasan yang ia kemukakan untuk merespons teologi politik yang mendefinisikan peran politik Gereja sebagai mempengaruhi masyarakat luas melalui individu-individu Kristen (2002, 84). Menurut model ini, Gereja memberikan kontribusi terhadap masyarakat melalui individu-individu Kristen yang, setelah dibentuk secara spiritual oleh dan di dalam Gereja, kini bekerja demi kepentingan masyarakat secara umum. Kepedulian utama Gereja adalah urusan spiritual anggotanya, dan formasi spiritual ini diharapkan turut serta dalam pembentukan karakter anggotanya yang pada saat yang sama adalah juga warga negara dan anggota masyarakat yang lebih luas. Seturut pengamatan Cavanaugh, dalam sejarah diskursus keterlibatan Gereja dalam kehidupan publik, ide semacam ini dikemukakan antara lain oleh filsuf dan teolog Katolik Prancis Jacques Maritain (Cavanaugh 2014, 227).

Maritain mendukung pemisahan yang jelas antara tatanan spiritual dan tatanan temporal. Tatanan spiritual berada di bawah naungan Gereja, sedangkan tatanan temporal merujuk pada institusi politik sekuler. Meski demikian, mesti ditegaskan bahwa pemisahan ini tidak berarti bahwa Gereja kehilangan signifikansi politiknya secara utuh, sebab “tatanan spiritual harus menghidupkan dan mengangkat tatanan temporal” agar “manusia dapat hidup dengan lebih baik dalam kehidupan temporalnya” (Maritain 1996, 214, 222). Namun, dalam mengartikulasikan cara melaluinya signifikansi politik ini diwujudkan, Maritain berargumen bahwa yang terlibat dalam hidup publik bukanlah Gereja sebagai institusi, melainkan individu-individu Kristen yang terlibat dalam tatanan temporal. Keterlibatan orang Kristen dalam aksi sosial dan politik tidak hanya terwujud dalam rangka melayani negara, tetapi juga sebagai realisasi dari misi Gereja untuk turut serta dalam upaya mentransformasi tatanan temporal (Maritain 1996, 227).

Cavanaugh berkeberatan terhadap pandangan Maritain. Keberatan Cavanaugh terhadap teologi politik yang mendefinisikan peran politik Gereja sebagai upaya mempengaruhi masyarakat luas melalui partisipasi publik anggotanya ini sekali lagi didasarkan pada konsep bahwa Gereja secara inheren bersifat politik. Opsi Cavanaugh bagi peran politik Gereja yang bersifat langsung tidak hanya menunjukkan penolakan terhadap pandangan bahwa politik adalah urusan negara, tetapi juga penegasan bahwa dalam menjalankan peran politiknya, Gereja harus bertindak sebagai persekutuan orang-orang

yang berkomitmen pada iman mereka kepada Yesus Kristus. Mengikuti mending Paus Fransiskus, Cavanaugh menekankan bahwa keterlibatan Gereja tidak pernah dipandang sebagai inisiatif dan usaha personal-sporadis setiap orang Kristen, melainkan sebagai tindakan dari persekutuan orang-orang yang bersatu dalam Kristus (2016, 3; *Evangelii Gaudium*, 12).

TANGGAPAN KRITIS

Gagasan-gagasan utama teologi politik William T. Cavanaugh menampilkan terobosan baru dalam diskursus teologi politik, terutama dalam upaya merumuskan visi teologis tentang hakikat dan tugas-tugas politis Gereja. Gagasan-gagasannya dapat diandalkan sebagai alternatif terhadap keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam apa yang biasa dikategorikan sebagai model dominan dalam teologi politik. Namun, pada beberapa titik, gagasan Cavanaugh tampak bermasalah. Masalah tersebut terutama berkaitan dengan pandangan yang reduksionistik terhadap negara dan masyarakat sipil serta visi teologis mengenai monopoli Gereja dalam perwujudan kehendak Allah di dunia. Uraian selanjutnya merupakan tanggapan kritis terhadap pikiran Cavanaugh dengan berpusat pada dua kelemahan mendasar tersebut.

1. Pandangan yang Reduksionistik tentang Negara dan Masyarakat Sipil

Pemikir seperti Paul S. Rowe, misalnya, menilai bahwa konsep negara yang dianut Cavanaugh dalam teologi politiknya bermasalah karena

terlalu sempit dan sepihak. Penekanan yang berlebihan terhadap penggunaan kekuasaan koersif yang sah sebagai ciri utama negara telah membuat Cavanaugh tampak lupa akan kenyataan bahwa negara koersif telah mengalami transformasi menjadi negara liberal-demokratis, di mana pendekatan koersif dan totaliter telah digantikan oleh prinsip dan cara yang lebih demokratis (Rowe 2009, 530-532). Kekhawatiran serupa juga dikemukakan oleh Aristotle Papanikolaou. Baginya, definisi Cavanaugh tentang negara tampak digeneralisasi secara berlebihan, seolah-olah merepresentasikan eksistensi negara-bangsa secara keseluruhan (Papanikolaou 2012, 73).

Pada aras yang sama, Papanikolaou dan Rowe juga mengkritik Cavanaugh yang menentang mistifikasi negara sebagai satu-satunya penyedia kebaikan bersama dalam masyarakat. Menurut mereka, posisi Cavanaugh di sini tampaknya ambigu. Di satu sisi, ia mengakui bahwa negara berkomitmen untuk pelayanan publik, sementara di sisi lain ia dengan tegas mengklaim bahwa negara bukanlah pelindung kebaikan bersama. Cavanaugh, karenanya, terkesan meremehkan peran negara. Menurut Papanikolaou dan Rowe, negara liberal demokratis juga memperhatikan kebaikan bersama, dan dengan itu pandangan Cavanaugh tentang negara terkesan tidak berimbang (Papanikolaou 2012, 77-78; Rowe 2009, 591).

Kecenderungan reduksionistik yang sama juga berlaku untuk gagasan Cavanaugh tentang masyarakat madani atau masyarakat sipil. Menurut Rowe, apa yang digambarkan Cavanaugh sebagai masyarakat sipil yang telah dikolonisasi oleh negara hanya berlaku bagi

masyarakat sipil yang bekerja seturut model korporatis, dan tidak berlaku untuk masyarakat sipil yang menganut model pluralis. Dalam model korporatis, unsur-unsur masyarakat sipil berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai isu-isu tertentu yang diinisiasi oleh negara. Sebaliknya, dalam model pluralis, unsur-unsur masyarakat sipil memiliki otonomi dan kebebasan penuh untuk mengartikulasikan aspirasi mereka sendiri secara mandiri (Rowe 2009, 597-599). Aspek ini tampaknya luput dari perhatian Cavanaugh.

2. Ihwal Monopoli Gereja dalam Perwujudan Kehendak Allah

Menurut Cavanaugh, karena Gereja secara hakiki bersifat politis, maka tugas politiknya harus dijalankan secara langsung, dan tidak dengan cara mempengaruhi politik negara. Pada titik ini, kritik Cavanaugh terhadap teologi politik yang memaknai peran politik Gereja semata-mata sebagai institusi kritik sosial, juga kritiknya terhadap model masyarakat sipil dalam hubungan dengan peran politis Gereja, tampaknya berpotensi meremehkan peran penting yang dijalankan institusi-institusi politik yang juga bekerja untuk kepentingan publik. Christopher Insole, misalnya, mencermati bahwa posisi Cavanaugh berisiko mengabaikan kenyataan bahwa bahkan institusi-institusi sosial-politik sekuler, melalui rahmat dan kebebasan Allah, dapat turut ambil bagian dalam mewujudkan kehendak Allah dan berperan dalam menghadirkan Kerajaan Allah di dunia ini, dan karenanya layak mendapat dukungan dari Gereja (2006, 233-234). Dalam hal ini, Gereja perlu secara

aktif terlibat dalam dialog dan kerja sama berkelanjutan dengan institusi-institusi publik lainnya dalam kerangka upaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik untuk menyokong realisasi kesejahteraan bersama.

Kritik Insole tentu benar. Akan tetapi, Cavanaugh sebetulnya telah mengantisipasi kritik seperti ini. Ia memang menganut pandangan yang cukup negatif terhadap negara dan institusi-institusi politik sekuler lainnya. Namun, sebagaimana para pendukung teologi publik, Cavanaugh juga mengakui pentingnya dialog dengan mereka yang berada di luar Gereja. Apa yang menjadi khas dan berbeda pada Cavanaugh terletak pada caranya merumuskan bentuk dialog yang sejati. Ia, misalnya, menyatakan:

“Dalam situasi tertentu, melobi—atau lebih tepatnya, berdialog—bisa saja berguna. Namun, cara berdialog yang paling membuahkan hasil dengan mereka yang berada di luar Gereja adalah melalui praktik-praktik konkret yang tidak memerlukan penerjemahan ke dalam bahasa yang dianggap ‘netral’ untuk dapat dipahami. Tanggapan yang signifikan adalah menciptakan ruang-ruang di mana kisah-kisah alternatif mengenai kebaikan material dapat disampaikan, dan bentuk-bentuk ekonomi alternatif dapat diwujudkan” (2002, 94; Cf. 2016, 53).

Gagasan Cavanaugh demikian mewakili pandangannya tentang model dialog yang tepat dan efektif. Apa yang jelas terlihat dari konstruksi argumentasinya adalah penolakannya terhadap model dialog yang biasa dilakukan juga bertumpu pada argumentasi yang sama, yang dikemukakannya dalam mengkritik model keterlibatan politis Gereja dengan jalan mengambil bagian dalam

diskusi dan debat publik. Dalam dan melalui kritik-kritiknya yang demikian, Cavanaugh secara konsisten merumuskan visi teologisnya yang utama, bahwa Gereja adalah entitas politis dalam dirinya sendiri. Artinya, Gereja menjadi politis bukan karena dan dengan cara mempengaruhi politik negara, melainkan karena ikhtiar penuh komitmen mewujudkan visi politik alternatif yang bersumber dari identitasnya sebagai tanda dan sarana perwujudan Kerajaan Allah di dunia.

PENUTUP

Dalam artikel ini, saya telah membahas teologi politik William T. Cavanaugh sebagai satu model dalam teologi politik yang dapat dijadikan alternatif terhadap model dominan dalam teologi politik dengan segala kelemahannya. Dengan gagasan utama bahwa Gereja adalah entitas politis dalam dirinya sendiri, teologi politik Cavanaugh dapat dilihat sebagai kritik dan alternatif terhadap pandangan yang dianut model dominan dalam teologi politik. Seturut model dominan ini, hakikat dan peran politis Gereja adalah sesuatu yang mesti didefinisikan hanya dalam hubungannya dengan politik negara, yakni dalam kerangka pelaksanaan tugas sebagai penjaga tatanan nilai moral politis. Bagi Cavanaugh, peran politis Gereja tidak boleh sekadar dimengerti dalam kerangka tugas sebagai penjaga gawang moral bagi politik negara. Sebaliknya, peran politis Gereja dijalankan dengan cara mewujudkan model tatanan sosial politik alternatif berdasarkan visi religius yang diusungnya.

Tentu saja, pandangan ini bertolak dari gagasan dasar bahwa politik tidak identik dengan negara, dan bahwa urusan soal kemaslahatan bersama bukanlah monopoli negara. Dari perspektif teologi politik Cavanaugh, tugas politis Gereja adalah mewujudkan tatanan sosial yang dapat menjadi realisasi dari visi Kerajaan Allah dengan nilai-nilainya. Pemikiran-pemikiran Cavanaugh memang patut diapresiasi dan kelemahan-kelemahan dalam proposalnya patut dikritik. Berdasarkan uraian tentang gagasan-gagasan inti teologi politik Cavanaugh dan tanggapan kritis terhadapnya, tampak jelas bahwa penelitian lanjutan diperlukan, terutama untuk menyelidiki lebih lanjut soal hubungan antara Gereja dengan institusi sosial-politik sekular, khususnya negara.

Penelitian lanjutan ini penting sebab di satu sisi gagasan tentang sakramentalitas Gereja mengajarkan bahwa Allah aktif bekerja di dunia, bahkan juga di luar Gereja. Gagasan tentang sakramentalitas mengadopsi pandangan yang positif tentang dunia dan mengakui peran signifikan yang dapat disumbangkan oleh lembaga atau institusi sosial politik demi perwujudan rencana keselamatan Allah di dunia. Di sisi yang lain, Cavanaugh tampaknya menganut pandangan yang agak negatif terhadap politik yang dijalankan negara, bahkan sampai pada tingkatan menganggapnya sebagai bertentangan dengan politik Allah yang hendak diwujudkan oleh Gereja. Penelitian lanjutan misalnya dapat bertolak dari kritik Christopher Insole yang sempat didiskusikan sebelumnya (2006, 133-134).

Secara lebih konkret, diskusi lanjutan tersebut dapat diarahkan untuk menjawab

pertanyaan mendasar berikut: Apa yang dapat menjadi pendasaran teologis untuk menjembatani kesenjangan antara teologi politik Cavanaugh beserta pandangan negatifnya terhadap negara dengan pandangan lain yang mengatakan bahwa bahkan institusi politik sekuler, berkat rahmat dan kebebasan Allah, juga mengambil bagian dalam usaha perwujudan kehendak Allah, dan karenanya mengambil bagian aktif dalam perealisasi kerajaan Allah di dunia?

DAFTAR PUSTAKA

- Bell Jr., Daniel M. 2015. "Postliberalism and Radical Orthodoxy." In *The Cambridge Companion to Christian Political Theology*. Ed. Craig Hovey and Elizabeth Phillips, 110-132. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cavanaugh, William T. 2004. "Church." In *The Blackwell Companion to Political Theology*. Ed. William T. Cavanaugh and Peter Scott, 393-406. Malden, Oxford and Victoria: Blackwell Publishing.
- _____. 2001. "Eucharistic Sacrifice and the Social Imagination in Early Modern Europe." *Journal of Medieval and Early Modern Studies* 31: 585-605.
- _____. 2016. *Field Hospital: The Church's Engagement with a Wounded World*. Michigan and Cambridge: Eerdmans Publishing Company.
- _____. 2005. "Liturgy as Politics: An Interview with William T. Cavanaugh."

- The Christian Century* December 13: 28-31.
- _____. 2011. *Migrations of the Holy: God, State, and the Political Meaning of the Church*. Michigan and Cambridge: Eerdmans Publishing Company.
- _____. 2009. "Telling the Truth about Ourselves: Torture and Eucharist in the U.S Popular Imagination." *The Other Journal: An Intersection of Theology and Culture* May 8 (2009). <https://theotherjournal.com/.../telling-the-truth-about-ourselves-torture-and-eucharist-in-the-u-s-popular-imaginat/>. Accessed on September 02, 2018.
- _____. 2014. "The Church in The Streets: Eucharist and Politics." *Modern Theology* 30: 384-402.
- _____. 2017. "The Fall of the Fall in Early Modern Political Theology." *Political Theology* 18: 475-494.
- _____. 2009. *The Myth of Religious Violence*. Oxford: Oxford University Press.
- _____. 2002. *Theopolitical Imagination: Discovering the Liturgy as a Political Act in an Age of Global Consumerism*. London and New York: Bloomsbury.
- _____. 1998. *Torture and Eucharist*. Malden, Oxford and Victoria: Blackwell Publishing.
- Hauerwas, Stanley. 2014. "Church Matters." In *Christian Political Witness*. Ed. George Kalantzis and Gregory W. Lee, 17-34. Illinois: IVP Academic.
- Insole, Christopher. 2006. "Discerning the Theopolitical: A Response to Cavanaugh's Reimagining of Political Space." *Political Theology* 7: 323-335.
- Kim, Sebastian C. H. 2011. *Theology in the Public Sphere. Public Theology as a Catalyst for Open Debate*. London: SCM Press.
- Kirwan, Michael. 2014. "William T. Cavanaugh and René Girard: The Myth of Religious Violence." *Political Theology* 15 (2014): 509-521.
- Lohfink, Gerhard. 1999. *Does God Need the Church?: Toward a Theology of the People of God*. Trans. Linda M. Maloney. Minnesota: Liturgical Press.
- Maritain, Jacques. 1996. *The Collected Works of Jacques Maritain*, Vol. XI. Ed. Otto Bird. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Metz, Johann Baptist. 1969. *Theology of the World*. Trans. William Glen-Doepel. New York: Herder and Herder.
- Papanikolaou, Aristotle. 2012. *The Mystical as political: Democracy and Non-radical Orthodoxy*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Pope Francis. 2013. *Evangelii Gaudium: The Joy of the Gospel*. London: Catholic Truth Society.
- Rowe, Paul S. 2009. "Render unto Caesar... What? Reflections on the Work of William Cavanaugh." *The Review of Politics* 71 (2009): 583-605.
- Stackhouse, Max. 2007. *God and Globalization: Globalization and Grace*, Vol. IV. New York and London: Continuum.
- Taylor, Charles. 2004. *Modern Social Imagination*. Durham and London: Duke University Press.

Van Erp, Stephan. 2016. "World and Sacrament: Foundations of the Political Theology of the Church." *Louvain Studies* 39: 102-120.

Vatican Council II. 1990. "*Gaudium et Spes*, Pastoral Constitution on the Church in

the Modern World." In *Decrees of the Ecumenical Councils: Trent to Vatican II*. Ed. Norman P. Tanner, Vol. 2, 1069-1135. Washington DC: Sheed & Ward and Georgetown University Press.